



**LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS 1B
(402066)**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Negara Km. 11 Tanjung Pati Kelas 1B

Telp. 0752-7750092 Fax. 0752-7750369

Kabupaten Lima Puluh Kota - Sumatera Barat 26271

e-mail : [pengadilan agama tanjung pati@yahoo.com](mailto:pengadilan_agama_tanjung_pati@yahoo.com)

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang telah diubah dengan PMK nomor 222/PMK.05/2017. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB . Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjung Pati, 1 Juli 2024
Sekretaris



ZULFADHLI, S.H.
NIP. 19750130 200012 1 003





DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel dan Lampiran	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	x
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca.....	5
III. Laporan Operasional.....	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB.....	11
A.2. Basis Akuntansi	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.4. Dasar Pengukuran	14
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	22
B.1. Pendapatan	22
B.2. Belanja	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	38
D. 1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	38
D. 2 Beban Pegawai	38
D. 3 Beban Persediaan	39
D. 4 Beban Barang dan Jasa	39
D. 5 Beban Pemeliharaan.....	40
D. 6 Beban Perjalanan Dinas	40
D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	41
D. 8 Kegiatan Non Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	42

E.1.	Ekuitas Awal	42
E.2.	Surplus/ (Defisit) LO	42
E.3.	Transaksi Antar Entitas.....	42
E.3.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	43
E.4.	Ekuitas Akhir	43
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	43
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	43
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	44
F.2.1.	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.....	44
F.2.2.	Rekening Pemerintah	44
F.2.3.	Revisi DIPA	44
F.2.4.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB.....	45
F.2.5.	Penggantian Pejabat Perbendaharaan	45



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2024 dan 2023	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	2
Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	4
Tabel 4 Neraca per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	5
Tabel 5 Laporan Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	7
Tabel 6 Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	9
Tabel 7 Penggolongan Kualitas Piutang	17
Tabel 8 Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	19
Tabel 9 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	21
Tabel 10 Revisi Anggaran per 30 Juni 2024	22
Tabel 11 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2024	23
Tabel 12 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2024 dan 2023	23
Tabel 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024	23
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	24
Tabel 15 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	25
Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	26
Tabel 17 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	27
Tabel 18 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	27
Tabel 19 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	27
Tabel 20 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	29
Tabel 21 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	30
Tabel 22 Rincian Belanja Dibayar di Muka	30
Tabel 23 Rincian Persediaan	30
Tabel 24 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	31
Tabel 25 Mutasi Aset Tetap Tanah	32
Tabel 26 Rincian Tanah	32
Tabel 27 Mutasi Peralatan dan Mesin	33
Tabel 28 Mutasi Gedung dan Bangunan	33
Tabel 29 Mutasi Aset Tetap Lainnya	34
Tabel 30 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	35
Tabel 31 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024	35
Tabel 32 Mutasi Aset lain-lain	36
Tabel 33 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	38
Tabel 34 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	39
Tabel 35 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	39
Tabel 36 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	40
Tabel 37 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	40
Tabel 38 Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	41
Tabel 39 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	41
Tabel 40 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	42

Tabel 41 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Per 30 Juni 2024	43
Tabel 42 Perbandingan DDEL dan DKEL per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	43
Tabel 43 Daftar Revisi DIPA per 30 Juni 2024	45

Lampiran I Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/ Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

Lampiran II Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Jl. Negara KM 11 Tanjung Pati, Kec. Harau, Kab Limapuluh Kota

Website: www.pa-tanjungpati.go.id e-mail: pengadilan_agama_tanjungpati@yahoo.com WA: 0116651908

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Tanjung Pati, 1 Juli 2024
Sekretaris,

ZULFADHLI, S.H.
NIP. 19750130 200012 1 003



RINGKASAN



Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB Periode 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan Belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni TA 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.237.000,- atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp 2.284.776.994,- atau mencapai 59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.863.283.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024			30 Juni 2023
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	2.237.000	0,00	0
Belanja Negara	3.863.283.000	2.284.776.994	59	2.610.615.703

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 15.502.464.136,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 18.000.000,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp 15.479.204.999,- Aset Lainnya sebesar Rp. 5.259.137,-Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,- .

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 15.502.464.136,- dan Rp 15.485.412.261,-

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Rp	%
ASET				
Aset Lancar	18.000.000,-	948.125,-	17.051.875	1.798
Aset Tetap	15.259.790.903,-	15.479.204.999,-	(219.414.096)	(1.42)
Aset Lainnya	5.259.137	5.259.137	0	0.00
JUMLAH ASET	15.283.050.040	15.485.412.261	(202.362.221)	(1.31)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang kepada Pihak Ketiga	234.711.587	3.256.857	231.454.730	7.106
Uang muka dari KPPN	18.000.000	0	18.000.000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	252.711.587	3.256.857	249.454.730	7.659
EKUITAS				
Jumlah Ekuitas	15.030.338.453	15.482.155.404	(451.816.951)	(2.92)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15.283.050.040	15.485.412.261	(202.362.221)	(1.31)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing- masing adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban Operasional masing- masing adalah sebesar Rp. 2.736.593.945,- dan Rp 2.725.702.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (2.736.593.945),- dan Rp (2.725.702.000),- Kegiatan Non Operasional Rp. 2.237.000,- dan 0,- serta Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,-. Dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 2.237.000,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO masing- masing sebesar Rp (2.734.356.945),- dan Rp (2.725.702.000),-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 15.030.338.453,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (2.734.356.945) kemudian ditambah dengan Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.282.539.994,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp 15.030.338.453,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 JUNI 2024			30 JUNI 2023	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
A Pendapatan Negara						
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	2.237.000	0	0
Jumlah Pendapatan Negara			0	0	0	0
B Belanja Negara						
1	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.697.764.000	1.746.787.158	65	1.566.889.015
2	Belanja Barang	B.2.2.	1.165.519.000	537.989.836	46	679.026.688
3	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	364.700.000
Jumlah Belanja Negara			3.863.283.000	2.284.776.994	59	2.610.615.703

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI NERACA PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023 (dalam satuan Rupiah)

Tabel 4 Neraca per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	18.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	948.125
Persediaan	C.1. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		18.000.000	948.125
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	5.153.603.000	5.153.603.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3.394.061.324	3.394.061.324
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	11.256.017.200	11.256.017.200
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	927.109	927.109
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 5.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(4.544.817.730)	(4.325.403.634)
Jumlah Aset Tetap		15.259.790.903	15.479.204.999
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain - lain	C.3 1.	238.167.941	238.167.941
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.3 2.	(232.908.804)	(232.908.804)
Jumlah Aset Lainnya		5.259.137	5.259.137
Jumlah Aset		15.283.050.040	15.485.412.261
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4.		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	234.711.587	3.256.857

NERACA

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Uang Muka dari KPPN	C.4. 2.	18.000.000	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		252.711.587	3.256.857
Jumlah Kewajiban		252.711.587	3.256.857
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	15.030.338.453	15.482.155.404
Jumlah Ekuitas		15.030.338.453	15.482.155.404
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		15.283.050.040	15.485.412.261

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023 (dalam satuan Rupiah)

Tabel 5 Laporan Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Kegiatan Operasional			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D. 2	1.952.973.745	1.747.482.844
Beban Persediaan	D. 3	17.733.700	18.325.850
Beban Barang dan Jasa	D. 4	327.628.400	337.392.718
Beban Pemeliharaan	D. 5	163.458.679	312.624.402
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	55.385.325	50.114.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	219.414.096	259.762.186
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.736.593.945	2.725.702.000
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.736.593.945)	(2.725.702.000)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D. 8	2.237.000	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D. 8.1	2.237.000	0
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.237.000	0
SURPLUS / DEFISIT - LO		(2.734.356.945)	(2.725.702.000)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023
(dalam satuan Rupiah)

Tabel 6 Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Ekuitas Awal	E. 1	15.482.155.404	15.574.173.324
Surplus / Defisit LO	E. 2	(2.734.356.945)	(2.725.702.000)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar		--	--
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Selisih Revaluasi Aset		0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi		0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 3	2.282.539.994	2.627.984.453
Kenaikan / Penurunan Ekuitas		(451.816.951)	(97.717.547)
Ekuitas Akhir	E. 4	15.030.338.453	15.476.455.777

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB

Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB didirikan pada tahun 1960 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB berkedudukan di Jl. Negara Km. 11 Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dia juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Tugas pokok peradilan agama berdasarkan undang-undang tersebut adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pengadilan Agama Tanjung Pati berkomitmen dengan visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Pati yang agung.”

Misi Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Strategi Stabilitas:
 - a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB, serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.

b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang.

3. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Ketua MA-RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang Pedoman pelayanan Informasi di Pengadilan. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik dan benar difokuskan pada optimalisasi Pengawas, baik Pengawas melekat, Pengawas fungsional dan penanganan pengaduan sebagai acuan manajemen komunikasi dan pemberian Informasi serta transparansi peradilan dengan menggunakan Teknologi Informasi melalui situs www.pa-tanjungpati.go.id.

5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip porposionalitas.

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.
 - 1). Kebijakan
 - a. Mengkoordinasikan perumusan visi dan misi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB dengan kebijakan pimpinan.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para Hakim di bidang hukum acara dan hukum materil Pengadilan Agama.
 - c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur peradilan di bidang administrasi peradilan.
 - d. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - e. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan sesuai dengan manajemen modern.
 - f. Meningkatkan pelaksanaan kinerja organisasi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB.
 - g. Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasana berikut fasilitasnya.
 - 2). Program
 - a. Menyusun bahan visi dan misi Peradilan Agama.
 - b. Menyusun bahan / materi pembinaan teknis peradilan Agama.
 - c. Memantapkan pelaksanaan sistim dan prosedur penyelenggaraan administrasi kepaniteraan.
 - d. Menyusun materi dan sistem serta prosedur pengelolaan administrasi kesekretariatan di bidang kepegawaian, umum dan keuangan serta perencanaan TI dan Pelaporan.
 - e. Mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja satuan organisasi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB.
 - f. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawas.

A.2. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui dan mempengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Alikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada UAPPA-W Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB adalah pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp310.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aset ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/ BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2018 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo

lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangannomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. **Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran**

Selama periode sampai 30 Juni 2024 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) guna menyesuaikan antara rencana penarikan dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 10 Revisi Anggaran per 30 Juni 2024

URAIAN	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	2.697.764.000	2.697.764.000
Belanja Barang	1.165.519.000	1.165.519.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	3.863.283.000	3.863.283.000

Anggaran setelah revisi tidak mengalami Penambahan dikarenakan Revisi yang dilaksanakan hingga akhir Juni hanya untuk Revisi Halaman III Dipa.

B.1. **Pendapatan**

*Realisasi
Pendapatan :
Rp.2.237.000,-*

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 2.237.000,- atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,- Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 11 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	Naik /Turun Rp	Persen %
1.	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0	2.237.000	0	∞
2.	Pendapatan Lain-lain	0	0	0	∞
Total Pendapatan		0	2.237.000	0	∞

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 berjumlah Rp. 2.237.000,-. Hal ini diperoleh dari pendapatan pelepasan aset non lancar dari penjualan BMN .

Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi TA 2024	RealisasiTA 2023	Naik (Turun) Rp	%
3.	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	2.237.000	0	0	∞
4.	Pendapatan Lain-lain	0	0	0	∞
Total Pendapatan		2.237.000	0	0	∞

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
: Rp
2.284.776.994,-*

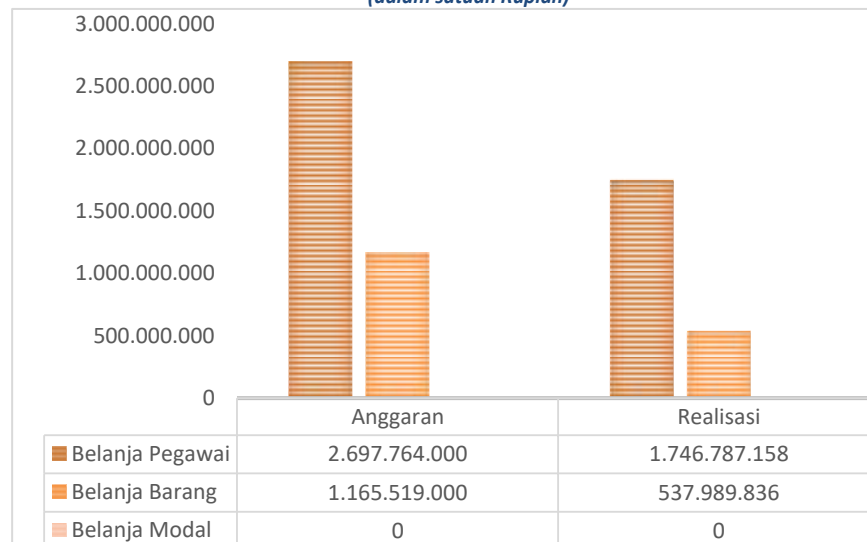
Realisasi Belanja instansi pada lingkup Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 2.284.776.994,- atau sebesar 59 persen dari anggaran senilai Rp 3.863.283.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.697.764.000	1.746.787.158	65
Belanja Barang	1.165.519.000	537.989.836	46
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	3.863.283.000	2.284.776.994	59
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja	3.863.283.000	2.284.776.994	59

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)



Realisasi belanja per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. (493.934.087,-) atau sebesar (18.92) persen dibandingkan realisasi belanja pada per 30 Juni 2023 hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 ini PA Tanjung Pati tidak ada mendapatkan alokasi anggaran Belanja Modal. Belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 179.898.143,- atau sebesar 11.48 persen, belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp. (141.036.852,-) atau sebesar (20.77) persen.

Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.746.787.158	1.566.889.015	179.898.143	11.48
Belanja Barang	537.989.836	679.026.688	(141.036.852)	(20.77)
Belanja Modal	0	364.700.000	364.700.000	100
Total Belanja	2.284.776.994	2.610.615.703	(493.934.087)	(18.92)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
1.746.787.158,-*

Realisasi Belanja Pegawai pada lingkup Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B per 30 Juni 2024 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp 1.746.787.158,- dan Rp 1.566.889.015,-. Berdasarkan perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 179.898.143 atau sebesar 11.48 persen dari realisasi belanja pegawai per 30 Juni TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan 2 orang Hakim dan 2 orang Pegawai PA Tanjung Pati Kelas 1B di akhir periode per 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.746.787.915	1.566.889.033	179.898.882	11.48
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/ POLRI	0	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.746.787.915	1.566.889.033	179.898.882	11.48
Pengembalian Belanja Pegawai	(757)	(18)	(44)	(244.4)
Jumlah Belanja	1.746.787.158	1.566.889.015	179.898.143	11.48

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
:
Rp.537.989.836,-*

Realisasi Belanja Barang pada lingkup Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 537.989.836,- dan 30 Juni 2023 sebesar Rp. 679.026.688,- Realisasi belanja barang per 30 Juni TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. (141.036.852),- atau sebesar (20.77) persen dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena penurunan realisasi belanja barang pada pagu TA 2024. Dengan rincian per masing- masing belanja dapat dilihat pada perubahan naik turun sebagai berikut; barang operasional mengalami penurunan

sebesar Rp. (9.408.400),- atau sebesar (3.35) persen disebabkan oleh penurunan realisasi, belanja barang persediaan Rp. 2.889.040,- atau sebesar 15.50 persen, belanja jasa Rp. 5.799.016,- atau sebesar 23.53 persen, belanja pemeliharaan sebesar Rp. (142.396.833),- atau sebesar (47.13) persen disebabkan oleh penurunan realisasi dan belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp. 11.081.325,- atau sebesar 25.01 persen.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	270.977.500	280.385.900	(9.408.400)	(3.35)
Belanja Barang Non Operasional	0	9.000.000	0	0
Belanja barang persediaan	21.516.200	18.627.160	2.889.040	15.50
Belanja Jasa	30.434.632	24.636.616	5.799.016	23.53
Belanja Pemeliharaan	159.676.179	302.073.012	(142.396.833)	(47.13)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	55.385.325	44.304.000	11.081.325	25.01
Jumlah Belanja Kotor	537.989.836	679.026.688	(141.036.852)	(20.77)
Pengembalian Belanja Barang	(0)	(0)	0	0,00
Jumlah Belanja	537.989.836	679.026.688	(141.036.852)	(20.77)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 364.700.000,- Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada Tahun 2024 tidak terdapat pagu Belanja Modal pada PA Tanjung Pati. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi
Belanja
Modal:Rp. 0,-

Tabel 17 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	364.700.000	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	364.700.000	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Jumlah Belanja	0	364.700.000	0	0

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin:
Rp.0,-

Pada Tahun 2024 tidak terdapat pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada PA Tanjung Pati. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Perubahan	
			Rp	%
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	364.700.000	364.700.000	0
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	364.700.000	364.700.000	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Jumlah Belanja	0	364.700.000	364.700.000	0

Pada tahun 2023 terdapat belanja pembelian 1 unit kendaraan dinas roda 4.

B.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan:
Rp.0,-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. Pada tahun 2024 tidak ada pagu Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 19 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp 18.000.000,-

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 18.000.000,- dan Rp. 948.125,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.051.875,- atau 1.798 persen.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Tanjung Pati per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 20 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Perubahan	
			Rp	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	18.000.000	0	18.000.000	100
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	948.125	(948.125)	(100)
Persediaan	0	0	0	0
Jumlah Total	18.000.000	948.125	17.051.875	1.798

111.847.400 42.000.000 69.847.400 166,31

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.18.000.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 18.000.000 dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Uang tunai di Brankas	18.000.000	0
Kuitansi GU yang belum di SPM kan	-	-
Jumlah	18.000.000	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka: Rp.0,-

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan 948.125,- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/ jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Pembayaran sewa hosting dan domain web	0	948.125
Jumlah	0	948.125

C.1.3. Persediaan

Persediaan: Rp 0,-

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Persediaan
per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
1.	Barang Konsumsi	0	0
2.	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3.	Persediaan Lainnya	0	0
	Total	0	0

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan senilai Rp. 0,- berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Semester I Tahun 2024 Nomor 1598/SEK.PA.W3-A16/KU1.1.2/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap: Rp 15.259.790.903,-

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.15.259.790.903,- dan Rp. 15.479.204.999,-

Aset tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada Pengadilan Agama Tanjung Pati per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 24 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Perubahan	
			Rp	%
1. Tanah	5.153.603.000	5.153.603.000	0	0,00
2. Peralatan dan Mesin	3.394.061.324	3.394.061.324	0	0,00
3. Gedung dan Bangunan	11.256.017.200	11.256.017.200	0	0,00
4. Aset Tetap Lainnya	927.109	927.109	0	0,00
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
Jumlah Total	19.804.608.633	19.804.608.633	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.544.817.730)	(4.325.403.634)	(219.414.096)	(5,07)
Nilai Buku Aset Tetap	15.259.790.903	15.479.204.999	(219.414.096)	(1,42)

C.2.1. Tanah

**Tanah: Rp
5.153.603.000,-**

Nilai Aset Tetap berupa Tanah pada Pengadilan Agama Tanjung Pati per 30 Juni 2024 sama dengan per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp. 5.153.603.000,-

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Mutasi Aset Tetap Tanah
(dalam satuan Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5.153.603.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2024	5.153.603.000

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 ini tidak terdapat perubahan atau mutasi tambah ataupun kurang pada aset tetap tanah.

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Tanah
(dalam satuan Rupiah)

No	KIB	Luas (m2)	Lokasi	Nomor Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Nilai
1.	1	1.020 m2	Jl. Negara KM. 11 Tanjung Pati	P.22	Pemerintah RI C.q MA-RI	Digunakan untuk Bangunan Mess/Rumah Arsip PA Tanjung Pati	1.043.093.000
2.	2	4.000 m2	Jl. Negara KM. 12 Tanjung Pati	7	Pemerintah RI C.q MA-RI	Digunakan untuk Bangunan Gedung Kantor PA Tanjung Pati	4.110.510.000
Jumlah							5.153.603.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

**Peralatan dan
Mesin : Rp
3.394.061.324,-**

Nilai Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.3.394.061.324,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 27 Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	3.394.061.324
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer masuk online	0
Mutasi Kurang	
Penghapusan	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2024	3.394.061.324
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(2.871.354.717)
Nilai Buku 30 Juni 2024	522.706.607

Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang sampai dengan tanggal pelaporan per 30 Juni 2024.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 11.256.017.200

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 masing- masing sebesar Rp 11.256.017.200 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Mutasi Gedung dan Bangunan
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	11.256.017.200
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2024	11.256.017.200
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(1.673.463.013)
Nilai Buku 30 Juni 2024	9.582.554.187

Pada per 30 Juni 2024 tidak terdapat Mutasi tambah dan tidak ada Mutasi Kurang pada Gedung dan Bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 927.109,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 927.109,-

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	927.109
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN	0
Saldo per 30 Juni 2024	927.109
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	927.109

Rincian mutasi aset tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0,-

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan /atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,-

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 30 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	
Pengembangan KDP SELESAI	0
Mutasi Kurang:	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	0

Rincian KDP disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (4.544.817.730,-)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp (4.544.817.730) dan Rp (4.325.403.634).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini:

Tabel 31 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.394.061.324	(2.871.354.717)	522.706.607
2	Gedung dan Bangunan	11.256.017.200	(1.673.463.013)	9.582.554.187
3	Aset Tetap Lainnya	927.109	0	927.109
	Jumlah	14.651.005.633	(4.544.817.730)	10.106.187.903

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya:
Rp.5.259.137,-

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 total nilainya sama yakni sebesar Rp. 5.259.137,-

C.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp 238.167.941,-

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing - masing adalah sebesar Rp 238.167.941,- Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Tanjung Pati serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 32 Mutasi Aset lain-lain
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	238.167.941
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang :	---
Saldo per 30 Juni 2024	238.167.941
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	238.167.941

Pada TA yang berakhir per 30 Juni 2024 terdapat Transaksi pengurangan aset lain-lain berupa Usulan Barang Rusak Berat pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2024 ini.

C.3.1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya: Rp.(232.908.804)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (232.908.804)-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp 234.711.587,-

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 234.711.587,- dan Rp. 3.256.857,-
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Uang Muka dari KPPN: Rp. 18.000.000,-

C.4.2 Uang muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 18.000.000,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar, dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.5. Ekuitas

Ekuitas: Rp 15.030.338.453,-

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 15.030.338.453,- dan Rp 15.482.155.404,- Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D. 1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP : Rp. 2.237.000,- Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 yakni sebesar Rp. 2.237.000 dan Rp. 0,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 33 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	NAIK/ (TURUN)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Pendapatan atas Penjualan Aset BMN	2.237.000	0	100
TOTAL	2.237.000	0	100

D. 2 Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 1.952.973.745,- Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.952.973.745,- dan Rp 1.747.482.844,- . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan rupiah)

URAIAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	846.976.640	759.585.140	11,51
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	-18	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.829	12.072	-2,01
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	#DIV/0!
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	62.509.364	55.362.430	12,91
Beban Tunj, Anak PNS	22.289.342	18.309.602	21,74
Beban Tunj. Struktural PNS	23.400.000	21.880.000	6,95
Beban Tunj. Fungsional PNS	762.075.000	680.540.000	11,98
Beban Tunj. PPh PNS	109.715.230	75.648.020	45,03
Beban Tunj, Beras PNS	49.028.340	47.000.580	4,31
Beban Uang Makan PNS	71.878.000	81.095.000	-11,37
Beban Tunj, Umum PNS	5.090.000	8.050.000	-36,77
Pengembalian Beban Tunj, Umum PNS	0	0	0,00
Pengembalian Beban Tunj, Fungsional PNS		0	0,00
Jumlah	1.952.973.745	1.747.482.826	11,76

D. 3 Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp 17.733.700,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 17.733.700,- dan Rp 18.325.850,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	17.733.700	18.325.850	(3,23)
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan	0	0	#DIV/0!

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp 327.628.400,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 327.628.400,- dan Rp 337.392.718,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai

berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	272.205.500	276.970.400	-1,72
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	250.000	-100,00
Beban Honor Operasional Satker	19.760.000	27.415.000	-27,92
Beban Barang Operasional Lainnya	4.428.000	1.496.500	195,89
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin- Ekstrakomptable	0	3.764.000	0,00
Beban Langganan Listrik	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Telepon	740.285	881.671	-16,04
Beban Langganan Air	1.190.990	775.355	53,61
Beban Sewa	29.303.625	25.839.792	13,41
Jumlah	327.628.400	337.392.718	-2,89

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp
163.458.679,-

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 163.458.679,- dan Rp 312.624.402,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88.644.000	267.862.500	-66,91
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	13.534.000	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.498.179	41.151.692	39,72
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	3.782.500	3.610.210	0,00
Jumlah	163.458.679	312.624.402	-47,71

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
55.385.325,-

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 55.385.325,- dan Rp 50.114.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	55.385.325	50.114.000	10,52
Beban Perjalanan Paket Meeting Luar Kota		0	#DIV/0!
Jumlah	55.385.325	50.114.000	10,52

D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 219.414.096,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 219.414.096,- dan Rp. 262.243.436,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89.062.063	131.891.403	(32,47)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	130.352.033	130.352.033	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Tetap Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	219.414.096	262.243.436	(16,33)
Beban Penyusutan aset Non Lancar	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	219.414.096	262.243.436	(16,33)

D. 8 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non Operasional : Rp. 2.237.000,-

Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	2.237.000	0	2.237.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.237.000	0	2.237.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	2.237.000	0	2.237.000

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya bersumber dari Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Rp 0,- Sedangkan Beban dari kegiatan non operasional sebesar Rp 0,- merupakan beban penyesuaian nilai persediaan.

Pendapatan/ Beban Penyesuaian Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.482.155.404,- dan Rp. 15.574.173.324,-

E.2. Surplus/ (Defisit) LO

Surplus (defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp (2.734.356.945) dan Rp (2.725.702.000). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas : Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp 2.282.539.994,- dan Rp 2.627.984.453,-

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan Ke Entitas Lain	2.284.776.994,-
Diterima Dari Entitas Lain	(2.237.000)
Transaksi Antar Entitas	2.282.539.994

E.3.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp. 2.237.000,- sedangkan DKEL sebesar Rp 2.284.776.994,-

Sedangkan perbandingannya per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42 Perbandingan DDEL dan DKEL per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
DDEL	(2.237.000)	0
DKEL	2.284.776.994	2.610.615.703
Jumlah	2.282.539.994	2.610.615.703

E.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp 15.030.338.453,-

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 15.030.338.453,- dan Rp. 15.476.455.777,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Selama per 30 Juni Tahun Anggaran 2024, BPK tidak ada melakukan audit terhadap Pengadilan Agama Tanjung Pati.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah BRI Cabang Payakumbuh A/C 0256-01-00055-31-7 a.n. BPG 011 PA TANJUNG PATI 01 Kelompok Rekening GIRO sesuai dengan Persetujuan KPPN Bukittinggi No. S-370/WPB.03/KP.0331/2015 tanggal 31/03/2015. Rekening ini digunakan sebagai Penampung DIPA BUA sampai dengan tanggal 03 Mei 2021. Berdasarkan petunjuk dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja dan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1674/SEK.KU.01/9/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Permohonan Persetujuan Perubahan Rekening Satker dari Giro ke Rekening Virtual, Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B sudah menggunakan Rekening Virtual dengan Nomor Rekening 653244020661000 Saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024.

F.2.3. Revisi DIPA

Sampai 30 Juni 2024 Pengadilan Agama Tanjung Pati telah melakukan 2 (dua) kali revisi. Revisi dilakukan karena adanya Perubahan Rencana Penarikan dalam Halaman III DIPA.

Berikut uraian Revisi Pengadilan Agama Tanjung Pati yang terjadi dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2024:

Tabel 43 Daftar Revisi DIPA per 30 Juni 2023

No	Revisi Ke	Tanggal	Digital Stamp	Keterangan
1.	1	06-02-2024	DS: 0390-4367-6001-6156	• Perubahan halaman III DIPA
2.	2	04-04-2024	DS: 0390-4367-6001-6156	• Perubahan halaman III DIPA

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Per tanggal 30 Juni 2024 pada PA Tanjung Pati tidak ada terdapat data ralat SSBP, SSPB dan SPM.

F.2.5. Penggantian Pejabat Perbendaharaan

Dari Januari sampai 30 Juni 2024 tidak ada terdapat penggantian pejabat perbendaharaan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Zulfadhli, SH
 Pejabat Pembuat Komitmen : Robi Gema Putra, S.Kom
 PPSPM : Adriyeni, SH
 Bendahara Pengeluaran : Atika Dewi, A.Md
 Bendahara Penerima : Yeni Marliza, S.Sy
 PPADG : Kemal Pasha, S.kom

LAMPIRAN

- Lampiran I Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/ Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
- Lampiran II Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2024
- Lampiran III Rekapitulasi Data Penerimaan Hibah per 30 Juni 2024

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024**

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Nilai Buku
				s.d 30-06-2024	Per 30-06-2024
A	Tanah				
1	Tanah	-	5.153.603.000	-	5.153.603.000
	Jumlah		5.153.603.000	-	5.153.603.000
B	Peralatan dan Mesin				
1	Alat Bantu	7	194.544.000	-	-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	543.279.328	(25.335.714)	278.692.858
3	Alat Kantor	5	503.621.550	(412.500)	825.000
4	Alat Rumah Tangga	5	1.190.192.297	(13.228.962)	52.014.572
5	Alat Studio	5	104.843.085	(6.381.782)	32.209.092
6	Alat Komunikasi	5	30.071.200	-	-
7	Komputer Unit	4	580.404.362	(36.221.979)	129.040.461
8	Peralatan Komputer	4	247.105.502	(7.481.126)	29.924.624
	Jumlah		3.394.061.324	(89.062.063)	522.706.607
C	Gedung dan Bangunan				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	9.809.334.900	(110.615.268)	8.360.715.012
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	516.658.000	(10.304.645)	370.967.223
3	Tugu/Tanda Batas	50	930.024.300	(9.432.120)	850.871.952
	Jumlah		11.256.017.200	(130.352.033)	9.582.554.187
D	Aset Tetap Lainnya				
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	4	927.109	-	927.109
	Jumlah		927.109	-	927.109
E	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah	0			
1	Alat Kantor		12.809.500	-	-
2	Alat Rumah Tangga		17.330.939	-	-
3	Alat Studio		18.487.765	-	-
4	Alat Komunikasi		29.590.000	-	-
5	Komputer Unit		132.940.200	-	-
6	Peralatan Komputer		21.750.400	-	-
7	Bahan Perpustakaan Tercetak		5.259.137	-	-
	Jumlah		238.167.941	-	5.259.137
	Total		20.042.776.574	(219.414.096)	15.265.050.040



Tanjung Pati, 30 Juni 2024
Sekretaris,

ZULFADHLI, S.H.
NIP. 19750130 200012 1 003

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
TABEL KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)
PER 30 Juni 2024

No	Uraian	Lokasi	Tahun	No Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	% Pengerjaan	Pengerjaan (Rp)	Ket
	NIHIL							

Tanjung Pati, 30 Juni 2024

Sekretaris,



ZULFADHLI, S.H.

NIP. 19750130 200012 1 003

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
Daftar Hibah Langsung Berupa Uang / Barang / Jasa
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah (Rp)	Sudah Disahkan (Rp)	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
							NIHIL

Tanjung Pati, 30 Juni 2024

Sekretaris,

**ZULFADHLI S.H.**

NIP. 19750130 200012 1 003